

REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia, selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak";

MENIMBANG hubungan bersahabat antara kedua negara;

BERHASRAT untuk menyederhanakan prosedur terkait dengan kunjungan warga negara masing-masing ke Republik Indonesia dan Republik Kolombia;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

Warga Negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, dan Warga Negara Republik Kolombia, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk

masuk, singgah dan tinggal di wilayah Pihak lainnya untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

PASAL 2
MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor dari warga negara masing-masing Pihak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

PASAL 3
TEMPAT-TEMPAT PEMERIKSAAN KEDATANGAN

Warga negara salah satu Pihak pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah wajib masuk ke dalam wilayah Pihak lainnya melalui tempat-tempat pemeriksaan kedatangan yang dibuka untuk lalu lintas penumpang internasional.

PASAL 4
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Warga Negara dari salah satu pihak, yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau pos konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

PASAL 5
PEMBATASAN VISA

Pemegang paspor yang sah dari salah satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan ini dapat masuk dan keluar dari wilayah Pihak lainnya, melalui titik yang diijinkan untuk tujuan tersebut oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun kecuali yang telah ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai dan kesehatan, dan lainnya yang secara hukum dapat diterapkan kepada pemegang paspor diplomatik dan dinas.

PASAL 6
HAK PIHAK BERWENANG

Salah satu Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang diberikan pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas berdasarkan Persetujuan ini apabila dianggap bahwa orang tersebut tidak dikehendaki.

PASAL 7
CONTOH PASPOR

Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, contoh-contoh paspor yang dipergunakan oleh masing-masing Pihak sebelum Persetujuan ini mulai berlaku serta setiap contoh paspor baru sebelum mulai diterbitkan.

PASAL 8
PENANGGUHAN

1. Masing-masing Pihak, dapat, setiap saat, menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan publik.

2. Pemberlakuan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam Ayat 1 Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya, 7 (tujuh) hari sebelumnya melalui saluran diplomatik.

PASAL 9
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul di antara Para Pihak terhadap penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan diantara Para Pihak.

PASAL 10
PERUBAHAN

Para Pihak dapat menyepakati untuk melakukan perubahan terhadap Persetujuan ini. Perubahan tersebut wajib dilakukan melalui persetujuan bersama antara Para Pihak, dan wajib mulai berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dari Persetujuan ini.

PASAL 11
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir, dimana Para Pihak saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan internal untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan nasionalnya telah dipenuhi.

2. Setelah berlaku, Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan dapat diakhiri atas keinginan salah satu Pihak yang wajib

memberitahukan keputusannya secara tertulis kepada Pihak lainnya, melalui jalur diplomatik, 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Nusa Dua, pada hari kesepuluh bulan Juni, tahun 2013 dalam dua rangkap asli, dalam Bahasa Indonesia, Spanyol, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

DIAN TRIANSYAH DJANI

Direktur Jenderal
Amerika dan Eropa

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK KOLOMBIA

ALFONSO GARZÓN MÉNDEZ

Duta Besar Republik Kolombia
Untuk Republik Indonesia



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA
ON
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL OR SERVICE PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Colombia hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as the "Parties";

RECOGNISING the existing friendly ties between the two countries;

DESIRING to simplify the procedures relating to visits of nationals of their countries to the Republic of Indonesia and the Republic of Colombia;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1
VISA EXEMPTION

Nationals of the Republic of Indonesia, holders of valid diplomatic or service passports, and nationals of the Republic of Colombia, holders of valid diplomatic or official passports shall not be required to obtain visas to enter,

transit through or stay in the territory of the other Party for a period which does not exceed 30 (thirty) days from the date of entry.

ARTICLE 2
DURATION OF PASSPORT VALIDITY

The duration of passport validity of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months before entering the territory of the other Party.

ARTICLE 3
CHECK-POINTS OF ENTRY

The nationals of the Party holding diplomatic or official or service passports shall enter the territory of the other Party through check-points open for international passenger traffic.

ARTICLE 4
VISA FOR MEMBER OF DIPLOMATIC AND CONSULAR MISSIONS

Nationals of either Party who are holders of valid diplomatic and official or service passports and assigned as members of diplomatic or consular mission in the territory of the other Party, including their family members, shall be required to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the other Party prior to their entry.

ARTICLE 5
VISA RESTRICTION

The holders of the valid passports of either Party referred to this Agreement may enter into and depart from the territory of other Party by any point authorized for that purpose by the competent immigration authorities, without

any restriction except for those stipulated in the security, migratory, customs and sanitary regulations and others which may be legally applicable to holders of diplomatic and official or service passports.

ARTICLE 6
THE RIGHT OF AUTHORITIES

Either Party reserves the right to refuse admission of entry or shorten the duration of stay of any person entitled to visa exemption and facilities under this Agreement if it considers that person undesirable.

ARTICLE 7
SPECIMEN OF PASSPORT

The Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of their passports being used by each Party before the entry into force of this Agreement as well as specimens of any new passports before their introduction.

ARTICLE 8
SUSPENSION

1. Each Party may, at any time, temporarily suspend all or part of this Agreement for reasons of national security, public order or public health.

2. The introduction as well as termination of the measures stated in paragraph 1 of this Article shall be duly informed to other Party 7 (seven) days in advance through diplomatic channels.

ARTICLE 9
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the Parties on the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties.

ARTICLE 10
AMENDMENTS

The Parties may agree on amendments to this Agreement. The adoption of amendments shall be done by common agreement between the Parties, and shall enter into force as indicated in Article 11 of this Agreement.

ARTICLE 11
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the date of the receipt of the last written notification in which the Parties inform each other, through diplomatic channels, that all requirements for the entry into force of this Agreement, as stipulated by their respective national legislation, have been fulfilled.

2. Once in force, this Agreement should be valid for an indefinite period and may be terminated at the will of either Party who shall notify its decision by written notification to the other Party, through diplomatic channels, 90 (ninety) days prior to the expected date of termination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in Nusa Dua on this 10th day of June of 2013, in duplicate, in the Indonesian, Spanish and English language, all texts being equally authentic. In case of any differences of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DIAN TRIANSYAH DJANI
Director General
for America and Europe

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA

ALFONSO GARZÓN MÉNDEZ
Ambassador of the Republic of Colombia
for the Republic of Indonesia

REPUBLIK INDONESIA

ACUERDO
ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA
Y
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
SOBRE EXENCIÓN DE VISAS PARA LOS TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES O DE SERVICIOS

El Gobierno de la República de Indonesia y el Gobierno de la República de Colombia, referidos en adelante individualmente como una "Parte" y colectivamente, como las "Partes";

RECONOCIENDO los vínculos amistosos que existen entre los dos países;

DESEANDO simplificar los procedimientos relacionados con las visitas de los nacionales de sus países a la República de Indonesia y la República de Colombia;

DE CONFORMIDAD con las leyes y reglamentaciones vigentes de los respectivos países;

HAN ACORDADO lo siguiente:

ARTÍCULO 1
EXENCIÓN DE VISADO

Los nacionales de la República de Indonesia, titulares de pasaportes vigentes diplomáticos o de servicio, y los nacionales de la República de Colombia, titulares de pasaportes vigentes diplomáticos u oficiales, no tendrán que obtener visado para ingresar, transitar o permanecer en el territorio de otra Parte por un periodo que no exceda 30 (treinta) días desde la fecha de ingreso.

ARTÍCULO 2
VIGENCIA DEL PASAPORTE

La vigencia del pasaporte de los nacionales de cualquiera de las Partes debe ser de al menos 6 (seis) meses, previos al ingreso al territorio de la otra Parte.

ARTÍCULO 3
PUNTOS DE CONTROL DE ENTRADA

Los nacionales de la Parte que tengan pasaporte diplomático u oficial o de servicio ingresarán al territorio del país de la otra Parte en los puntos de control abiertos para tráfico de pasajeros internacionales.

ARTÍCULO 4
VISA PARA MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS O CONSULARES

Los nacionales de cualquiera de las Partes que sean titulares de pasaportes vigentes diplomáticos y oficiales o de servicio, y asignados como miembros de una misión diplomática o consular en el territorio de la otra Parte, incluidos los miembros de su familia, deberán obtener previamente al ingreso una visa de entrada adecuada a través de la Embajada de la otra Parte.

ARTÍCULO 5
RESTRICCIÓN DEL VISADO

Los titulares de pasaportes válidos de cualquiera de las Partes que se refieren en este Acuerdo podrán ingresar y salir del territorio de la otra Parte por cualquier punto autorizado para tal fin por las autoridades competentes de inmigración, sin ninguna restricción, salvo las que se estipulen en las disposiciones de seguridad, migración, aduaneras y sanitarias y otras que

puedan ser legalmente aplicables a los titulares de pasaportes diplomáticos u oficiales o de servicio.

ARTÍCULO 6
DERECHO DE LAS AUTORIDADES

Cualquiera de las Partes se reserva el derecho de negar la admisión de ingreso o acortar la duración de permanencia de cualquier persona con derecho a exención y facilidades de visado según este Acuerdo, si esa Parte considera que esa persona no es deseable.

ARTÍCULO 7
ESPECIMEN DEL PASAPORTE

Las Partes intercambiarán entre sí, por vía diplomática, especímenes de sus pasaportes que utiliza cada una de ellas antes de que este Acuerdo entre en vigencia, así como especímenes de pasaportes nuevos antes de la introducción de los mismos.

ARTÍCULO 8
SUSPENSIÓN

1. Cada una de las Partes podrá, en cualquier momento, suspender temporalmente este Acuerdo, bien sea total o parcialmente, por razones de seguridad nacional, orden público o salud pública.

2. La introducción, así como la terminación de las medidas señaladas en el parágrafo 1 de este Artículo deberán ser informadas por los canales diplomáticos a la otra Parte con 7 (siete) días de anticipación.

ARTÍCULO 9
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Las diferencias que surjan entre las Partes con respecto a la interpretación o implementación de este Acuerdo serán resueltas de manera amigable mediante consultas o negociaciones entre las Partes.

ARTÍCULO 10
ENMIENDAS

Las Partes podrán concertar enmiendas al presente Acuerdo. La adopción de las enmiendas se efectuará de común acuerdo entre las Partes y las mismas entrarán en vigor en la forma indicada en el Artículo 11 del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 11
ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN

1. El presente Acuerdo entrará en vigor 30 (treinta) días desde la fecha en que haya sido recibida la última notificación escrita en la que las Partes se informan mutuamente, a través de canales diplomáticos, que todos los requisitos para la entrada en vigor del Acuerdo han sido cumplidos según lo estipulado por las respectivas legislaciones nacionales.

2. Una vez entrado en vigor, este Acuerdo será válido por un periodo indefinido y podrá ser terminado por voluntad de cualquiera de las Partes quien informará de su decisión mediante notificación escrita a la otra Parte, a través de la vía diplomática, 90 (noventa) días previos a la fecha prevista de terminación.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los abajo suscritos firman, habiendo estado debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han rubricado el presente Acuerdo.

DADO en Nusa Dua hoy día 10 de junio de 2013, en duplicado, indonesio, español e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de diferencias en interpretación, prevalecerá el texto en inglés.

POR EL GOBIERNO DE
LA REPÚBLICA DE INDONESIA

DIAN TRIANSYAH DJANI

Director General
de América y Europa

POR EL GOBIERNO DE
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALFONSO GARZÓN MÉNDEZ

Embajador de la República de Colombia
ante la República de Indonesia